



RENJA (Rencana Kerja) **TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN TEBING**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2024" dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Nasional yang dilaksanakan melalui OPD Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, serta sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2024, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2024 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Tebing , 2023

CAMAT TEBING



MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos

NIP.19750321 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	7
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	7
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	8
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	8
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB V. PENUTUP	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.....	9
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan	25
2.3.1 Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia	25
2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana	26
2.3.3 Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan	26

2.4	Review Terhadap Rancangan Awal	27	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			47
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	47	
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48	
3.3	Program dan Kegiatan	48	
3.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48	
3.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50	
3.3.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.....	50	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			51
BAB V PENUTUP			61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022	11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022	22
Tabel 2.3 Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Tebing	24
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kecamatan Tebing	25
Tabel 2.5 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Tebing	28
Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEBING TAHUN ANGGARAN 2023	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja, dalam hal ini Renja Kecamatan Tebing, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Tebing merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Tebing, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan harus mencakup 5 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, di mana dengan adanya pemilihan kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat kepala daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintahan di atasnya;
5. Pendekatan Bottom-Up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintahan dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom Up diseleraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Tebing tahun 2022 didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembar Negara tahun 1999, Nomor 181, tambahan lembaran Negara nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten rokan hulu, Kabupaten natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan kota Batam (Lembaran Negara tahun 2008, nomor 107, Tambahan lembaran Negara nomor 4880);

2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sisitem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,tambahan lembaran Negara republikj Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2006 nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2006 Nomor 97,Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentnang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemrintahan Daerah kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 19 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 nomor 19);
16. Peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten karimun tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah kebuapten Karimun tahun 207 nomor & ,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70)
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 74)
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor 71.
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud**

Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Tebing untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

➤ **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tahun 2022 adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan serta tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah, Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan / realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan disesuaikan dengan format halaman terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nopmor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja. Jika perangkat daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah ;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Deskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaah terhadap kebijakan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat dalam Renja Kecamatan besisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tebing (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2022 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Tebing sebesar **Rp. 6.359.328.093** (*Enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas belanja langsung sebesar **Rp. 2.430.885.054,00** (*Dua milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima puluh empat*) dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.108.443.039,00** (*Empat milyar seratus delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah*).

Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **6.060.313.688,00** (*Enam milyar enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau mencapai **92,67%** dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. **3.704.549.596,00** (*Tiga milyar tujuh ratus empat juta limaratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah*) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. **2.355.764.092,00** (*Dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Sembilan puluh dua rupiah*) terdiri dari 2 program dengan 6 kegiatan yang terbagi menjadi 14 sub kegiatan. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja jasa tenaga administrasi, dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran; pada jabatan eselon IV yang kosong, serta yang purna tugas.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tebing, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Tebing tahun berjalan (tahun 2023).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026) - Ambil di Aplikasi SIPD, hanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di DPA Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) (Renstra 2021 s/d 2026) - Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) - Akhir Periode Renstra BUKAN Tahun 2026 (Lihat di Aplikasi SIPD untuk Target Kinerja dan Anggaran lihat di Tabel 6.1)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022) - Ambil di Aplikasi SIPD					
		7		8		9														
		K		Rp		K					Rp		Renja		APBD Murni		Pergeseran 2			
K		Rp		K		Rp		K	RP	K	RP	K	RP							
		7					UNSUR KEWILAYAHAN	Indeks Pelayanan Publik		4.00										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec.Tebing	7	01				KECAMATAN	Nilai AKIP Kecamatan Tebing	Nilai	64										
1		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	31,409,953,000	80	6,208,241,247	78	4,159,500,000	78	4,905,422,929	78	Rp 5,521,022,493	

		7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	36	364,000,000	5	52,047,300	2	125,000,000	2	15,000,000	2	Rp	30,378,500
		7	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	193,000,000	2	17,833,300	1	75,000,000	1	5,000,000	1	Rp	13,824,000
		7	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	171,000,000	3	34,214,000	1	50,000,000	1	10,000,000	1	Rp	16,554,500
		7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	15	19,028,453,000	2	4,145,879,627	2	3,780,000,000	2	3,705,365,375	2	Rp	4,118,271,039
		7	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / Bulan	2.450	18,091,453,000	560	3,955,495,627	560	3,600,000,000	560	3,631,821,875	560	Rp	3,996,213,039
		7	01	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	12	937,000,000	12	190,384,000	12	180,000,000	12	73,543,500	12	Rp	122,058,000

		7	01	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	231,000,000	8	16,025,000	-	-	-	-	-	Rp	-
		7	01	01	2	05	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	87,500,000	2	3,720,000	2	15,000,000	2	10,000,000	2	Rp	9,157,000
		7	01	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	50	78,000,000	10	800,000	-	-	-	-	-	Rp	-
		7	01	01	2	09	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	358,000,000	120	125,903,000	70	60,000,000	70	149,963,000	70	Rp	120,662,000
		7	01	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	1	269,000,000	1	199,273,000	-	-	-	-	-	Rp	-
		7	01	01	2	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	200	269,000,000	5	199,273,000	-	-	-	-	-	Rp	-
		7	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa	Laporan	20	9,080,000,000	3	1,283,416,828	2	1,800,000,000	2	953,299,754	2	Rp	1,142,759,754

		7	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	60	47,000,000	3000	750,000	-	-	-	-	-	Rp	-
		7	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	417,000,000	36	81,746,828	6	80,000,000	6	81,999,754	6	Rp	84,859,754
		7	01	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	8,616,000,000	858	1,200,920,000	80	1,720,000,000	80	871,300,000	80	Rp	1,057,900,000
		7	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Laporan	30	72,000,000	2	38,483,542	2	45,000,000	2	36,991,000	2	Rp	36,991,000
		7	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60	35,500,000	12	37,033,542	10	5,000,000	10	6,994,000	10	Rp	6,994,000

		7	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	36,500,000	7	1,450,000	10	40,000,000	10	29,997,000	10	Rp	29,997,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4.01	5,776,088,000	3.3	1,043,605,600	3.01	1,140,000,000	3.01	901,900,000	3.01	Rp	981,314,600
		7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	Laporan	5	5,776,088,000	1	1,043,605,600	1	1,140,000,000	1	901,900,000	1	Rp	981,314,600
		7	01	02	2	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	8	5,776,088,000	8	1,043,605,600	6	1,140,000,000	6	901,900,000	6	Rp	981,314,600

No.	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2022 - Perangkat Daerah dapat Menyesuaikan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
	I			II			III			IV								14 = 10+11+12+13	15 = 14 / 9 (Pergeseran 1) x 100%	16 = 8 + 14 (Penjumlahan Sesuaikan dengan maksud dan tujuan indikator)	17=16/7x100%
K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K (Penjumlahan Sesuaikan dengan maksud dan tujuan indikator)	Rp	K	Rp	K	Rp				
																		0	-		
1	10	21.22%	Rp 1,040,908,897	30	28.75%	Rp 1,410,421,301	25	26.59%	Rp 1,304,578,856	10	27.06%	Rp 1,327,188,134	75	5,083,097,188	1	92%	1	11,291,338,435	1	36%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	1	26.40%	Rp 3,960,000	1	59.15%	Rp 8,872,000		53.35%	Rp 16,206,500	2	29,038,500	1	96%	1	81,085,800	1	22%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	0.3	43.00%	Rp 2,150,000	0.3	56.76%	Rp 2,838,000	0.4	63.92%	Rp 8,836,000	1	13,824,000	1	100%	1	31,657,300	1	16%	Kecamatan Tebing

	0	0.00%	Rp -	0.2	18.10%	Rp 1,810,000	0.4	60.34%	Rp 6,034,000	0.4	44.52%	Rp 7,370,500	1	15,214,500	1	92%	1	49,428,500	1	29%	Kecamatan Tebing
	0	21.25%	Rp 787,488,897	1	28.44%	Rp 1,053,790,905	0.5	25.32%	Rp 938,206,690	0.5	22.70%	Rp 934,891,104	2	3,714,377,596	1	90%	1	7,860,257,223	1	41%	Kecamatan Tebing
	120	21.68%	Rp 787,488,897	160	27.67%	Rp 1,004,761,905	130	25.16%	Rp 913,692,190	110	22.18%	Rp 886,376,604	520	3,592,319,596	240	90%	240	7,547,815,223	240	42%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	6	66.67%	Rp 49,029,000	3	33.33%	Rp 24,514,500	3	39.75%	Rp 48,514,500	12	122,058,000	6	100%	6	312,442,000	6	33%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -		0.00%	Rp -		0.00%	Rp -	0	Rp -	0	0.00%	0	197,290,500	0	62%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -		0.00%	Rp -		0.00%	Rp -	0	Rp -	0	0.00%	0	197,290,500	0	62%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	1	8.94%	Rp 17,409,800	2	45.84%	Rp 89,275,300	2	53.46%	Rp 122,743,400	5	229,428,500	3	100%	3	521,251,950	3	23%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	5	33.32%	Rp 1,000,000	0	0.00%	Rp -	10	66.64%	Rp 2,000,000	15	3,000,000	3	100%	3	4,350,000	3	11%	Kecamatan Tebing

	0	0.00%	Rp -	13	53.89%	Rp 10,778,800	7	28.11%	Rp 5,622,000	16	80.54%	Rp 68,454,800	36	84,855,600	6	100%	6	224,681,050	6	16%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	5	17.79%	Rp 2,100,000	10	43.38%	Rp 5,120,000	5	38.75%	Rp 4,574,000	20	11,794,000	4	100%	4	15,994,000	4	30%	Kecamatan Tebing
	-	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -		0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -	0	-	-	0%	-	16,025,000	-	7%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	1	35.31%	Rp 3,531,000	0.5	-19.69%	-Rp 1,969,000	0.5	82.51%	Rp 7,555,000	2	9,117,000	0	10%	1	12,837,000	1	15%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -		0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -	0	-	0	0%	0	800,000	0	1%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -	50	53.68%	Rp 80,502,300	20	33.28%	Rp 40,159,600	70	120,661,900	0	100%	0	246,564,900	0	69%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -		0.00%	Rp -		0.00%	Rp -		0.00%	Rp -	0	-		0%	0	199,273,000	0	74%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -			Rp -		0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -	0	-	0	0%	0	199,273,000	0	74%	Kecamatan Tebing
	0.5	26.58%	Rp 253,420,000	0.7	34.37%	Rp 327,660,596	0.5	26.63%	Rp 253,908,366		21.17%	Rp 241,914,330	1.7	1,076,903,292	1	94%	1	2,360,320,120	1	26%	Kecamatan Tebing

	0	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -	0.00%	Rp -	0	0.00%	Rp -	0	-	0	0%	0	750,000	0	2%	Kecamatan Tebing	
	0	0.00%	Rp -	2	39.17%	Rp 32,115,596	2	32.02%	Rp 26,258,366	1.5	28.10%	Rp 23,849,330	5.5	82,223,292	1	97%	1	163,970,120	1	39%	Kecamatan Tebing
	20	29.09%	Rp 253,420,000	30	33.92%	Rp 295,545,000	20	26.13%	Rp 227,650,000	9	20.61%	Rp 218,065,000	79	994,680,000	0	94%	0	2,195,600,000	0	25%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	0.5	20.55%	Rp 7,600,000	1	38.70%	Rp 14,316,500		30.91%	Rp 11,432,800	1.5	33,349,300	1	90%	1	71,832,842	1	100%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	2	22.88%	Rp 1,600,000	5	47.90%	Rp 3,350,000	3	29.02%	Rp 2,030,000	10	6,980,000	2	100%	2	44,013,542	2	119%	Kecamatan Tebing
	0	0.00%	Rp -	3	20.00%	Rp 6,000,000	4	36.56%	Rp 10,966,500	2	31.35%	Rp 9,402,800	9	26,369,300	2	88%	2	27,819,300	2	76%	Kecamatan Tebing
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					
Predik																					

at Kinerja																					
	0.5	14.42%	Rp 130,092,000	1	31.35%	Rp 282,776,000	0.9	21.94%	Rp 197,866,000	0.61	37.35%	Rp 366,482,500	3.01	977,216,500	100%		2,020,822,100		35%	Kecamatan Tebing	
	0.2	14.42%	Rp 130,092,000	0.4	31.35%	Rp 282,776,000	0.2	21.94%	Rp 197,866,000	0.2	37.35%	Rp 366,482,500	1	977,216,500	4	100%	4	2,020,822,100	4	35%	Kecamatan Tebing
	0.2	14.42%	Rp 130,092,000	0.4	31.35%	Rp 282,776,000	0.2	21.94%	Rp 197,866,000	0.2	37.35%	Rp 366,482,500	1	977,216,500	4	100%	4	2,020,822,100	4	35%	Kecamatan Tebing

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Kecamatan Tebing tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Tebing dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kinerja Program kegiatan Kecamatan Tebing

No.	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun	Rencana Aksi	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		
					TAREGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	78	Membuat Koesioner terhadap pelayanan masyarakat			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Dokumen renja dan dokumen RB	100.00%	95.59%	95.59%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	2 Laporan	Pembayaran gaji ASN dan lainnya	100.00%	90.19%	90.19%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5 Laporan	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	100.00%	99.92%	99.92%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	2 Laporan	Pengadaan kebutuhan kantor dan gaji honorer	100.00%	94.24%	94.24%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	2 Laporan	Penyediaan akomodasi kendaraan dinas	100.00%	90.16%	90.16%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3.01	Nilai			
2	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan	1Laporan	Melaksanakan kegiatan urusan daerah bawah seperti mtq, musrenbang dll	100.00%	99.58%	99.58%

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Kecamatan Tebing tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Tebing

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu Kasubbag PRK dan staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon III, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Tebing merupakan pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pelayanan umum dan pemberi pelayanan administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tebing menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat diperlukan beberapa upaya serta tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dapat di lihat dari tabel analisis pencapaian kinerja Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Tebing

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode							Kondisi kinerja pada Akhir periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	75	78	78,5	79	79,5	80	80
AKIP Kecamatan Tebing	Nilai	53,45	54	60	61	62	63	64	64
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	50	56	59	59	59	59	59	59

Dapat di lihat dari tabel dibawah ini berkaitan dengan capaian kinerja Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Kecamatan Tebing

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	AKIP Kecamatan Tebing	37.50	52,59	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	78,3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tebing, 78 dan realisasi sebesar 78,3 (B). Kategori Pelayanan **BAIK**, maka memerlukan peningkatan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatankantor maupun kebijakan internal).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tebing melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

2.3.1 Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Tebing adalah :

- a. Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil
- b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

- c. Mendorong untuk bekerja yang professional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan;
- d. Memberikan insentif bagi petugas pelayanan.

2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh pelanggan;
- b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan;
- c. Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan;
- d. Menyediakan pengaduan masyarakat melalui media elektronik (email, teleprone, faximile)

2.3.3 Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan

Langkah dan upaya sangat diperlukan demi kemajuan suatu organisasi. Berikut ini upaya yang harus dilakukan di Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan memberi informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Tebing;
- b. Memberikan informasi dan penekanan kepada kepala desa/kelurahan melalui komperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan;
- d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2022 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tahun 2022 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2022 yang terdiri dari 2 program dengan 8 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tebing Tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Tebing

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tebing	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 35,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tebing	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 13,824,000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp. 30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp. 16,554,500	

B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tebing	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang (40 org x 14 bln)	Rp 3,600,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tebing	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang (40 org x 14 bln)	Rp. 3,996,213,039	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tebing	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 180,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tebing	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp. 122,058,000	
C Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 6,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 3,001,000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 195,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 84,990,200	

3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp. 8,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp. 11,803,000
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tebing	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tebing	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 9,157,000
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	Rp. 60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	Rp. 120,662,000
D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 80,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 84,859,754
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp. 1,720,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp. 1,057,900,000

E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp. 5,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp. 6,994,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp. 5,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp. 29,997,000	
F Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Rp. 1,140,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Rp. 981,314,600	

**REKAPITULASI USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022
USULAN ANGGARAN TAHUN 2023**

NO	LOKASI KEGIATAN KELURAHAN/DESA	NO	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. KELURAHAN PAMAK					
1	Pembangunan Drainase	1.1	RT. 001 RW. 003	100 m x 500 cm	Dinas PU dan PR
2	Semenisasi Jalan	2.1	RT. 001 RW. 001	700 m x 3 m	Dinas PU dan PR
		2.2	RT. 001 RW. 002	150 m x 3 m	
		2.3	RT. 002 RW. 002	200 m x 3 m	
		2.4	RT. 003 RW. 002	400 m x 4 m	
		2.5	RT. 003 RW. 002	70 m x 4 m	
		2.6	RT. 004 RW. 002	200 m x 3 m	
3	Perbaiki Tanggul	3.1	RT. 003 RW. 001	700 x 2 m	Dinas PU dan PR
4	Perbaiki Dermaga	4.1	RT. 003 RW. 003	50 x 4 m	Dinas PU dan PR
5	Jembatan/ Gorong- gorong dibesarkan	5.1	RT. 001 RW. 002	± 350 m	Dinas PU dan PR
6	Pengerasan Jalan	6.1	RT. 004 RW. 002	± 150 m	Dinas PU dan PR
7	Penyambungan Jalan	7.1	RT. 004 RW. 002	± 185 m	Dinas PU dan PR
		7.2	RT. 003 RW. 001	± 250 m	Dinas PU dan PR
8	Lampu Jalan	8.1	RT. 003 RW. 001	4 Titik	Dinas Perumahan Kawasan
9	Pembuatan WC	9.1	RT. 001 RW. 003	-	Pemukiman dan Kebersihan

II. KELURAHAN KAPLING					
1	Semenisasi Jalan	1.1	RT.001 RW.002	150 m x 3 m x 0.15 m	Dinas PU dan PR
2	Pembuatan Balai Pertemuan	2.1	RW.002	6 m x 10 m	Dinas PU dan PR
3	Pembuatan Pagar Kantor Lurah Kapling	3.1	RT.001 RW.001	33 m x 28.70 m x 2 m	Dinas PU dan PR
4	Pemasangan Paving Blok Kantor Lurah Kapling	4.1	RT.001 RW.001	20 m x 28.70 m	Dinas PU dan PR
5	Pembuatan Pos Kamling	5.1	RW.001	2 m x 3 m	Dinas PU dan PR
6	Drainase	6.1	RT.003 RW.001	200 m x 3 m x 3 m	Dinas PU dan PR
7	Perbaiki Drainase	7.1	RT.001 RW.004	100 m x 0.3 m x 0.5 m	Dinas PU dan PR
		7.2	RT.003 RW.001	101 m x 0.6 m x 0.6 m	
III. KELURAHAN HARJOSARI					
1	Drainase	1.1	RT. 001 RW.002 (Depan Poskampung s/d P.Simanjuntak)	-	
		1.2	RT. 001 RW.002 (Depan Rmh P.Kusen s/d R. P.Ranto)	-	
		1.3	RT. 001 RW.002 (Depan Rmh Pk Bukhori s/d SPBU)	500 m	Dinas PU dan PR
		1.4	RT. 002 RW.002 (Depan Rumah Hj.Salamah)	500m x 1 m x 1/2 m	
		1.5	RT. 002 RW.001 (Depan warung Bu Katemi)	150m x 1/2m x 1/2m	
		1.6	RT. 002 RW.002 (Depan Rumah P.Bukhori)	350 m	

		1.7	RT. 001 RW.003 (Simpang N Residence)	1 km	
		1.8	RT. 001 RW.003 (Depan Tanah Ibu Musri)	130 m	
		1.9	RT. 001 RW.003 (Simpang 4 s/d Samping Yayasan)	1,3 km	
		1.10	RT. 002 RW.003 (Depan Rumah P.Mustaji)	150 m	
		1.11	RT. 003 RW.003 (Jlan Lingkar)	750 x 1/2 x 1/2 m	
		1.12	RT. 003 RW.003 (Depan Rumah Pak Kamto)	200 m	
		1.13	RT. 003 RW.003 (Gg. Musholla At-taubah)	450 m	
		1.14	RT. 001 RW.004 (Sebelah Rumah P.Giono)	200 m	
		1.15	RT. 002 RW.004 (Simpang Alur Jongkong)	100 m	
		1.16	RT.003 RW.003 (Perumahan Harjosari Indah-Parit Induk)	130 m	
		1.17	RT. 002 RW.004 (Lapangan Volly s/d Parit Besar)	500 m	
		1.18	RT.002 RW.003 (Depan TPQ-	1 km	

			Siskamling)		
2	Semenisasi	2.1	RT. 001 RW.001 (Samping Rumah P.Sarimin)	170 x 3 m	Dinas PU dan PR
		2.2	RT. 001 RW.001 (Samping Rumah Pak RW Puji)	125 x 3 m	
	Semenisasi	2.3	RT. 001 RW.001 (Depan Rumah P.Tumin)	108 x 3 m	Dinas PU dan PR
		2.4	RT. 001 RW.002 (MDA)	109 x 3 m	
		2.5	RT. 002 RW.002 (kuburan s/d ke belakang)	170 m	
		2.6	RT. 003 RW.003 (Jln. Poyo)	214 m	
		2.7	RT. 002 RW.004 (Perumahan P.Atan Kayu)	200 m	
		2.8	RT. 002 RW.004 (Posyandu s/d Parit Besar)	300 m	
		2.9	RT.002 RW.002 (Rumah P.Salam- Gg.Rambutan)	200 m	
		2.10	RT.001 RW.004 (Jalan Sudiro s/d Danau)	200 m	
3	Perbaikan / Pengaspalan Jalan	3.1	RT. 002 RW.001 (Samping Warung P. Susanto)	200 x 3 m	Dinas PU dan PR
4	Turap Penahan Tanah / Batu Miring	4.1	RT. 003 RW.003 (Poskamling s/d	250 m	Dinas PU dan PR

			Danau)		
		4.2	RT. 002 RW.004 (Bangun Sari s/d Alur Jongkong)	500 m	
		4.3	RT.003 RW.003 (Kebun P.Sukarno - Danau)	200 m	
5	Paving Blok Lapangan	5.1	SDN. 008	-	Dinas PU dan PR
6	Perbaikan Toilet	6.1	SDN. 008	-	Dinas Pendidikan
7	Pembuatan Ruang UKS	7.1	SDN. 008	-	Dinas PU dan PR
8	Pengadaan Kambing	8.1	Lintas RW	500 Ekor	Dinas Pendidikan
9	Pengadaan Sapi	9.1	Lintas RW	200 Ekor	Dinas Pangan dan Pertanian
10	Pengadaan Ayam Kampung	10.1	Lintas RW	10.000 Ekor	Dinas Pangan dan Pertanian
11	Pengadaan Itik	11.1	Lintas RW	2000 Ekor	Dinas Pangan dan Pertanian
12	Pengadaan Pupuk	12.1	Lintas RW	20 Ton	Dinas Pangan dan Pertanian
13	Pengadaan Bibit Tanaman Hortikultura	13.1	Lintas RW	-	Dinas Pangan dan Pertanian
14	Pengadaan Mesin Pemecah Kedelai	14.1	Lintas RW	20 Ton	Dinas Pangan dan Pertanian
15	Pengadaan Kacang Kedelai	15.1	Lintas RW	20 Ton	Dinas Pangan dan Pertanian
16	Pelatihan Pengolahan Limbah Tahu dan Tempe	16.1	Lintas RW	-	Dinas Pangan dan Pertanian
17	Penghijauan di Kelurahan Harjosari	17.1	Lintas RW	-	Dinas Pangan dan Pertanian
18	Peningkatan Kampung Toga	18.1	Lintas RW	-	Dinas Pangan dan Pertanian
19	Pemasangan Lampu Kuning	19.1	RT.002 RW.004 (Perbatasan RT.001 & RT.001)		Dinas Perumahan Kawasan

		19.2	RT.003 RW.003 (Simpang 4 Perbatasan antar RT)		Pemukiman dan Kebersihan
20	Pemasangan Lampu Jalan	20.1	RT.002 RW.004 (Menuju Pesantren Ummah)	3 Tiang	
		20.2	RT.001 RW.004 (Rumah P.Prayetno - Rumah P.Awang)	3 Tiang	
		20.3	RT.003 RW.003 (Jalan Lingkar)	7 Tiang	Dinas Perumahan Kawasan
		20.4	RT.002 RW.003 (Masjid-Siskamling Rumah P.Amjon)	20 Tiang	Pemukiman dan Kebersihan
		20.5	RT.001 RW.003 (Perumahan N Residence)	16 Tiang	
21	Pemasangan Kaca Cembung	21.1	RT.002 RW.001 (Depan Rumah P.Zainal)	-	Dinas PU dan PR
		21.2	RT.002 RW.003 (TPQ Bangun Sari)	-	
		21.3	RT.002 RW.004 (Jalan 2 Titik)	-	
22	Pembangunan Tempat Wisata	22.1	RT.001 RW.004 (Tanah Pemuda Alur Jongkong)	1 Hektar	Dinas Pariwisata
IV. KELURAHAN TEBING					
1	Renovasi Drainase, Parit dan Box Couver	1.1	RT.001 RW.001 (Depan Toko ilal)	200 m	Dinas PU dan PR
		1.2	RT. 002 RW.001 (Gg.	250 m x 50 cm x 50 cm	

		Sahadan)		
		1.3 RT. 002 RW.001 (Gg. Haris)	200 m x 50 cm x 50 cm	
		1.4 RT. 002 RW.001 (Gg. Jumari)	150 x 50 x 50 m	
		1.5 RT. 002 RW.002 (Gg. Sahadan)	250 m x 50 cm x 50 cm	
		1.6 RT. 002 RW.002 (Gg. Aminah)	150 x 1 x 1 m	
		1.7 RT. 002 RW.002	150 x 1/2 x 1/2 m	
		1.8 RT. 002 RW.002 (Belakang Lapangan Bola)	100 x 1/2 x 1/2 m	
		1.9 RT.002 RW.003	250 m x 50 cm x 50 cm	
		1.10 RT. 004 RW.003 (Parit)	150 x 0.50 x 0.50 m	
		1.11 RT. 004 RW.003 (Drainase)	70 x 30 m	
		1.12 RT. 002 RW.002 (SDN 004 Tebing)	50 x 60 m	
	Renovasi Drainase, Parit dan Box Couver	1.13 RT.004 RW.003 (H.Masnur)	50 m x 50 m x 50 cm	Dinas PU dan PR
		1.14 RT. 004 RW.003 (Gg. Swadaya)	120 m x 50 cm x 50 cm	
		1.15 RT. 005 RW.002 (Couver I) Gereja HKBP Tebing Barat	4.5 m x1.5 m x 1.2 m	
		1.16 RT. 005 RW.002 (Couver II) Gereja HKBP Tebing Barat	6.5 m x1.8 m x 1.5 m	
		1.17 RT. 003 RW.002 (Box	12 m x2 m x 1.5 m	

			Culvert)		
		1.18	RT.001/RT002 RW.002 (Depan Depot Amiral)	17 x 3.50 x 220 m	
2	Semenisasi Jalan	2.1	RT. 002 RW.002 (Gg. Zahrum)	100 x 3 m	Dinas PU dan PR
		2.2	RT. 002 RW.002 (Penyambungan)	100 x 3 m	
		2.3	RT. 004 RW.003 (Depan Masjid Darul Amin)	4 m x 100 m	
		2.4	RT. 002 RW.003 (Samping Masjid Al-Ikhlas)	139,5 x 2,5 m	
		2.5	RT. 004 RW.003 (Penyambungan)	60 x 3 x 15 m	
		2.6	RT. 004 RW.003 (Penyambungan)	70 x 3 x 15 m	
3	Perbaiki Jalan Setapak	3.1	RT. 002 RW.001 (Gg. Norina)	350m x 3m x 15cm	Dinas PU dan PR
		3.2	RT. 002 RW.002 (Penyambungan)	100 x 3 m	
		3.3	RT. 004 RW.003 (Depan Masjid Darul Amin)	4 m x 100 m	
		3.4	RT. 002 RW.003 (Samping Masjid Al-Ikhlas)	139,5 x 2,5 m	
		3.5	RT. 004 RW.003 (Penyambungan)	60 x 3 x 15 m	
		3.6	RT. 004 RW.003 (Penyambungan)	70 x 3 x 15 m	

4	Perbaiki Jalan Setapak	4.1	RT. 002 RW.001 (Gg. Norina)	350m x 3m x 15cm	Dinas PU dan PR
5	Pembangunan Pagar Tembok Tanah Perkuburan	5.1	RT. 002 RW.001	250 m x 2 m	Dinas PU dan PR
		5.2	RT. 002 RW.002	250 m x 2 m	Dinas PU dan PR
6	Normalisasi Parit	6.1	RT.001 RW. 001 (Blkng Rumah H.Uyub ke laut)	700 x 2 x 1,5 m	Dinas PU dan PR
7	Batu Miring	7.1	RT. 002 RW.001	150mx60,40cmx60cm	Dinas PU dan PR
		7.2	RT. 002 RW.001	250 x 1.5 x 1.5 m	
	Batu Miring	7.3	RT. 002 RW.002	150mx60,40cmx60cm	Dinas PU dan PR
		7.4	RT. 003 RW.002	± 400 m	
		7.5	RT.001 RW.003 (Belakang Kantor Lurah)	100 m x 7 m	
8	Rehabilitasi Total Kantor Lurah Tebing	8.1	RT.001 RW.003	1 Paket	Dinas PU dan PR
9	Renovasi Balai Pertemuan	9.1	RT. 003 RW.002	20 m x 8 m	Dinas PU dan PR
10	Renovasi Pagar SDN 004	10.1	RT. 002 RW.002	150 m x 2,5 m	Dinas Pendidikan
11	Pembangunan Terali	11.1	RT.001 RW.002 (PAUD AL-AMIN)	20 m	Dinas Pendidikan
12	Renovasi WC	12.1	RT. 002 RW.002 (SDN 004)	4 Unit	Dinas Pendidikan
		12.2	RT.001 RW.002 (PAUD AL-AMIN)	2 Unit	Dinas Pendidikan
13	Sumur Bor	13.1	RT. 001 RW. 002 (Sekolah PAUD AL-AMIN)	1 Unit	Dinas Pendidikan
14	Pengadaan Kontainer Sampah	14.1	RT. 001 RW.001	1 Unit	Dinas Perumahan Kawasan

					Pemukiman dan Kebersihan
15	Penyambungan Pembangunan Jalan	15.1	RT. 005 RW.002 (Simpang Gereja HKBP Tebing Barat)	250 x 4 m	Dinas PU dan PR
16	Pembuatan Pintu Air	16.1	RT. 001 RW.001	5 x 5 m	Dinas PU dan PR
17	Pengaspalan Jalan	17.1	RT.001 RW.003 (JI.Bukit Berangan)	200 x 4 m	Dinas PU dan PR
		17.2	RT.001 RW.003 (JI.Selemah)	150 x 4 m	Dinas PU dan PR
18	Lampu Jalan	18.1	RT.001 RW.003	5 Tiang	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
19	Pembangunan Rumah Imam Mesjid	19.1	RT.004 RW.003 (Mesjid Darul Amin)	1 Unit	Dinas PU dan PR
20	Gorong-Gorong	20.1	RT. 004 RW.003	0,60 m x 5 m	Dinas PU dan PR
V. KELURAHAN TELUK UMA					
1	Pembangunan Drainase	1.1	RT.002, 003 RW.001	235 m x 1 m x 1 m	Dinas PU dan PR
		1.2	RT.002 RW.006	400 m	
2	Pelebaran Drainase	2.1	RT.003,001 RW.001	70 m x 80 m x 1 m	Dinas PU dan PR
3	Pembuatan Box Couver	3.1	RT.001 RW.003	1 Unit	Dinas PU dan PR
		3.2	RT.003 RW.007	2 m x 6 m	
		3.3	RT.002 RW.001 (Belakang Posyandu Raya)	3 m x 2 m x 1 m	
		3.4	RT.003 RW.002	2 m x 125 m	

4	Pembangunan Parit	4.1	RT.002 RW.003	250 m x 1 m x 1m	Dinas PU dan PR
		4.2	RW.006	200 m	
		4.3	RT. 001 RW. 007	1 m x 300 m	
5	Pengaspalan Jalan	5.1	RT.002, 003 RW.002 (Jalan Leho)	600 m x 4 m x 10 cm	Dinas PU dan PR
		5.2	RT.003 RW.005 (Jalan Selayar dan Pangkal Pinang)	4 m x 310	
6	Perbaikan Semenisasi	6.1	RT.002 RW.001	150 x 3 m x 10 cm	Dinas PU dan PR
7	Semenisasi	7.1	RW.003 RW.001 (Jalan Belakang Pasar)	3 m x 75 m	Dinas PU dan PR
		7.2	RT.001 RW.001 (Jalan Kamboja)	3 m x 200 m	Dinas PU dan PR
		7.3	RT.003 RW. 002 (Jalan Alam Mata Melayu)	250 m x 3 m x 15 cm	Dinas PU Prov. Kepri
		7.4	RT.001 RW.002 (Gang Saleh M. Nun)	2 m x 150 m	Dinas PU dan PR
		7.5	RT.002 RW.002 (Gang Malisa)	0,5 m x 100 m	Dinas PU dan PR
		7.7	RT.003 RW.002 (Jalan Kampung Melayu)	2 m x 125 m	Dinas PU dan PR
		7.8	RW.004 (Jalan Kenanga)	130 m x 3 m	Dinas PU dan PR
		7.9	RW.004 (Jalan Teratai)	250 m x 3 m	Dinas PU dan PR
		7.10	RT.001 RW.004	3 m x 72 m	Dinas PU dan PR
		7.11	RT.001 RW.006 (Blok A GPK)	300 m	Dinas PU dan PR

		7.12	RT.001 RW.006 (Blok E GPK)	4 m x 80 m	Dinas PU dan PR
		7.13	RT.002 RW.006 (Blok G GPK)	4 m x 80 m	Dinas PU dan PR
		7.14	RT.002 RW.006 (Blok I GPK)	5 m x 100 m	Dinas PU dan PR
		7.15	RT.001 RW.007	60 m x 3 m	Dinas PU dan PR
		7.16	RT.002 RW.007 (Depan Gang Leho)	175 m x 4 m x 10 m	Dinas PU dan PR
8	Pengadaan Lampu Jalan	8.1	RW.001	5 Titik	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
		8.2	RW.002	5 Titik	
		8.3	RW.003 RW.002	5 Titik	
		8.4	RW.003	6 Titik	
		8.5	RW.004	4 Titik	
		8.6	RT.001 RW.004	3 Titik	
		8.7	RW.005	6 Titik	
		8.8	RT.003 RW.005 (Jalan Selayar dan Pangkal Pinang)	5 Titik	
		8.9	RW.006	7 Titik	
		8.1	RT.001 RW.007	6 Titik	
		8.11	RT.002 RW.007	3 Titik	
9	Turap Penahan Tanah / Batu Miring	9.1	RT.002 RW.001	160 x 2 m x 30 cm	Dinas PU dan PR

		9.2	RT.001 RW.006	50 m	
10	Pembangunan Tambatan Perahu	10.1	RT.003 RW.002	200 x 3 m x 15 cm	Dinas PU dan PR
11	Rehab Pendopo	11.1	RT. 003 RW.002	4 m x 6 m	Dinas PU dan PR
		11.2	RW.004	-	
12	Pembangunan Lapangan Bola Volly	12.1	RT.003 RW.002	11 x 20 m x 15 cm	Dinas Pemuda & Olahraga
13	Pembangunan Lapangan Bola Takraw	13.1	RW.002	9 x 9 m	Dinas Pemuda & Olahraga
14	Rehab Lapangan Bola Kaki	14.1	RT.003 RW.002 (Lapangan Bola Kaki Leho)	80 x 80 m	Dinas Pemuda & Olahraga
15	Pembangunan Kelas Baru	15.1	SDN 002 Teluk Uma	3 Ruang	Dinas Pendidikan
16	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Se- Kelurahan	16.1	Meja	20 Unit	Dinas Kesehatan
		16.2	Sound Sistem	4 Unit	
		16.3	Kursi	300 Unit	
		16.4	Tenda	4 Unit	
17	Pengadaan untuk Posyandu Sekelurahan Teluk Uma	17.1	Air	-	Dinas Kesehatan
		17.2	Listrik	-	
		17.3	Timbangan Digital	-	
		17.4	Makanan tambahan dalam satu tahun	-	
		17.5	Timbangan Ibu Hamil	-	
		17.6	Alat Tensi	-	
18	Rehab Posyandu sekelurahan Teluk	18.1	Dek	-	Dinas Kesehatan

	Uma	18.2	Cat	-	
19	Pendalaman Drainase	19.1	RT.001 RW.001 (Belakang Pasar)	250 m x 45 m x 1 m	Dinas PU dan PR
20	Perbaikan Saluran Got	20.1	RT.003 RW.005	400 m	Dinas PU dan PR
21	Pembuatan Sumur Bor	21.1	RT.001 RW.006	2 Buah	Dinas PU dan PR
22	Pembuatan Pos Penjagaan	22.1	RT.001, 002 RW.006	2 Pos	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
23	Sosialisasi dan Perlombaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Se- Keluarga Teluk Uma	23.1	-	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan
24	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Se- Kelurahan Teluk Uma	24.1	-	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan
25	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	25.1	-	1 Kegiatan	Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA
26	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	26.1	-	1 Kegiatan	Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA
27	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	27.1	-	1 Kegiatan	Dinas Pariwisata
28	Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah lainnya	28.1	-	1 Kegiatan	Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA
29	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	29.1	-	1 Kegiatan	Dinas PMD
30	Peningkatan Kapasitas Tenaga	30.1	-	1 Kegiatan	Satpol PP

	Keamanan				
31	Pelatihan Tenaga Suka Relawan untuk Penanganan Bencana	31.1	-	1 Kegiatan	Dinas Sosial
VI. DESA PONGKAR					
1	Pemecah Gelombang	1.1	RW.003	30 m	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Peningkatan Jalan	2.1	Brigjend Katamso	-	Dinas PU dan PR
3	Semenisasi Jalan	3.1	RW.004	-	Dinas PU dan PR

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja SKPD.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan dalam kurun waktu hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan keputusan Bupati Karimun Nomor 123-B.b Tahun 2016;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Meningkatkan kualitas kinerja kepala seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi kecamatan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Tebing melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);

- f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan;
- g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa RPJMD Daerah sebagai jabaran visi misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat di dalam RPJMD tersebut adalah program satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi misi dan program kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Tebing harus mempersiapkan Renja sebagai Dokumen Rencana Kerja Kecamatan 1 tahun yang akan datang.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kegiatan merupakan tindakan nyata kecamatan tebing dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Program dan kegiatan Kecamatan Tebing Tahun 2023 sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/ Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah "Peningkatan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul" dan *Tagline* "Karimun Bangkit, Karimun Sehat, dan Bangkit Ekonomi, Bangkit Infrastruktur, SDM Unggul" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024, maka prioritas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2024 menguraikan rumusan rencana program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan dan pagu indikatif untuk proyeksi pendanaan Tahun 2024.

Rumusan Program/Kegiatan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2024 direncanakan sebanyak 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif sebesar **Rp 8,783,698,000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)**, yang dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN	
					2024	
					TARGET	RP (000)
1	2	3		5	10	11
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.55	8,783,698,000
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Tebing			Nilai AKIP Kecamatan Tebing	63	8,783,698,000
		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5	6,890,500,000
		7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	110,000,000
		7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen - Renja - Renstra	40,000,000

						- Renja RB	
		7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan - Lapkin		35,000,000
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi PK 2 Laporan		35,000,000
		7 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	- Evaluasi Renja - Evaluasi RB 3 Laporan		3,836,500,000
		7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	560 Org Bln		3,629,000,000
		7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(40 Org x 14 Bln) 12 Dokumen		190,000,000
		7 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Laporan		17,500,000
		7 01 01 2 02 07	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	- Laporan Keuangan		

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Semesteran Laporan Penyusunan Keuangan	Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	1 Laporan	35,000,000
		7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		2 Laporan		35,000,000
		7 01 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		- Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	3 Laporan	160,000,000
		7 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		1 Paket		70,000,000
		7 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Dokumen		30,000,000
		7 01 01 2 05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		- DUK 40 Org		60,000,000
		7 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Laporan		452,000,000

		7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Paket	8,500,000
		7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	213,000,000
		7 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,000,000
		7 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000
		7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	18,000,000
		7 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Dokumen	18,000,000
		7 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Paket	22,500,000
		7 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	60 Laporan	25,000,000
		7 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan Rapat	75,000,000
		7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan SPPD	
					1 Dokumen	10,000,000
					7 Laporan	315,000,000

		7 01 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40 Unit	60,000,000
		7 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	40 Unit	45,000,000
		7 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	12 Unit	45,000,000
		7 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,000,000
		7 01 01 2 07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan lainnya yang disediakan	3 Unit	40,000,000
		7 01 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	6 Unit	55,000,000
		7 01 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35,000,000
		7 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana yang disediakan	4 Laporan	1,855,000,000
		7 01 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000

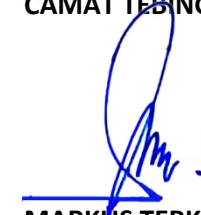
		7 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa	12 Laporan	85,000,000
		7 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan		
		7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan 13 Laporan	35,000,000 1,725,000,000
		7 01 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
		7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan 12 Unit	127,000,000 8,000,000
		7 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	7 Unit	8,500,000
		7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	50,000,000

		7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30,000,000
		7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	15,500,000
		7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000
		7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.55	1,203,198,000
		7 01 01 2 09 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Laporan	40,000,000
					2 Dokumen	40,000,000
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Indeks Mutu Pelayanan Publik	1 Laporan	1,163,198,000

			DAN PELAYANAN PUBLIK			
		7 01 02 2 01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	8 Laporan	1,163,198,000
		7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.00%	690,000,000
		7 01 02 2 04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>690,000,000</i>
		7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Unit	458,000,000
		7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	5 Pokma	232,000,000
		7 01 03 2 02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	3.55	8,783,698,000

		7 01 03 2 02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
		7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	63	8,783,698,000

Tebing, 2023
CAMAT TEBING



MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos
NIP.19750321 200312 1 009

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Tebing Tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tebing untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD (program 5 tahun), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tebing selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2024 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Tebing tahun 2024 merupakan program Pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Tebing pada periode 2024. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tebing yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tebing Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Tebing yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 2024 berfungsi pula sebagaisarana peningkatan kinerja Kecamatan Tebing. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Tebing sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja. Perangkat Daerah RENJA tahun 2023, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan.

Tebing, 2023

CAMAT TEBING



MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos

NIP.19750321 200312 1 009